
FAKTOR BERPENGARUH PADA KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ENAM PROVINSI DI PULAU JAWA

Daivy Olliffiana¹, Rifki Khoirudin²
^{1,2} Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

This economic development aims to improve the welfare of people's lives. Stable, high economic growth and stable income distribution are equally important for improving welfare. Economic growth is not a solution to solve problems, but it is a tool to overcome poverty due to inequality in income distribution in a region. If economic activity improves or develops, the community will feel the impact of these developments in the form of an increase in income levels. This study aims to analyze the factors that influence the level of income distribution on the island of Java. The variables used in this study are economic growth, the provincial minimum wage, the level of fiscal dispersion, and the human development index using regression analysis from 2014 to 2019. The findings of this study indicate that the only variables that affect income inequality are the state minimum wage and the level of income inequality. Reported unemployment. On the other hand, economic growth, decentralization, and the human development index do not affect income inequality.

Keywords : degree of fiscal decentralization; economic growth;

Correspondence to : rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi ini bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, tinggi, serta kestabilan distribusi pendapatan juga sama pentingnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu solusi untuk mengatasi masalah, melainkan hal tersebut merupakan alat untuk mengatasi kemiskinan akan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Jika kegiatan ekonomi membaik atau berkembang, masyarakat akan merasakan dampak dari perkembangan tersebut berupa peningkatan tingkat pendapatan. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat desentralisasi fiskal, dan indeks pembangunan manusia menggunakan analisis regresi dari tahun 2014 hingga 2019. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa satu-satunya variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah upah minimum negara dan tingkat pengangguran yang dilaporkan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, tingkat desentralisasi dan indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : derajat desentralisasi fiskal; pertumbuhan ekonomi,

Riwayat Artikel:

Received : 24 Juni 2021

Revised : 15 Oktober 2021

Accepted : 3 Desember 2021

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Peningkatan kesejahteraan membutuhkan pertumbuhan dan distribusi yang tinggi dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi pula dengan pemerataan hal tersebut agar tidak mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, lokasi, serta suku, hal tersebutlah yang menentukan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini juga menjadi penyebab ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses agar melengkapi sistem kelembagaan dan peningkatan pendapatan per kapita serta rill provinsi maupun Negara dalam jangka panjang (Arsyad, 2010). Pembangunan di bidang ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang, karena dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi maka akan tersedia sumber-sumber yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang lainnya (Faridah dan Syechalad)

Mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah inti dari pembangunan. Pertumbuhan bukanlah tujuan, namun melainkan alat yang digunakan sebagai proses mengidentifikasi kemiskinan dan juga agar mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Kecuali setiap orang secara adil dan setara menikmati hasil pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, bahkan jika kinerja ekonomi membaik, masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan muncul dan membaik atau membaik, semua orang akan membuat kemajuan ini. Salah satu bentuk pertumbuhan pendapatan. Program penanggulangan kemiskinan sebenarnya terus dilaksanakan pemerintah mulai dari inpres desa tertinggal (IDT), program kompensasi pengalihan subsidi BBM dan lain sebagainya (Abdulah, 2013). Pada tingkat nasional telah ditetapkan prioritas sasaran pembangunan nasional. Salah satu prioritas tersebut adalah melakukan pemerataan pembangunan serta mendorong pembangunan di daerah-daerah (Reza dkk, 2019).

Salah satu perbedaan antara masyarakat atau daerah maju dan tertinggal adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar disparitas distribusi pendapatan dan semakin besar disparitas pendapatan. Ini tidak bisa dihindari karena efek ekonomi dari produksi sempurna. Jika jarak antara kedua wilayah menyempit dengan pertumbuhan wilayah di mana mereka berada, berarti ada efek yang baik (negatif) karena ada efek ekonomi. Sebaliknya jika selisih antara kedua daerah lebih besar maka pengaruh terhadap proses polarisasi (*polarization effect*) kurang baik (negatif) (Kurniasih, 2013). Disparitas pendapatan di setiap daerah dapat dikaitkan dengan pembangunan yang cenderung berfokus pada pertumbuhan dan tingkat keuntungan dari daerah yang berbeda dengan daerah yang telah maju. Hal tersebut tentunya memperkuat dalam pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah itu sendiri. Namun, pertumbuhan ekonomi masih relatif lemah di beberapa daerah. Menurut data BPS, laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia di tahun 2019 mencapai 5,02%. Hal tersebut yang menandakan perekonomian yang positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara didorong oleh tingkat pertumbuhan ekonomi regional yang positif.

Setiap negara berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran (Damanik dkk, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Rosa dan Sovita). Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan disebut dengan (ketimpangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan masalah yang sangat utama yang di alami banyak Negara terutama di Negara yang sedang berkembang dan Indonesia adlah salah satunya (Tulus, 2011). Jawa merupakan pusat dari perekonomian pemerintah, akan tetapi dalam situasi seperti ini tentunya banyak menimbulkan hal yang sangat menantang pembangunan selama ketimpangan itu disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Pada tahun 2019, DIY dengan indeks ketimpangan yang jauh lebih tinggi juga memiliki tingkat desentralisasi paling rendah dibandingkan dengan lima negara bagian lainnya (47%). Sebaliknya, lima negara bagian lain di Jawa lebih terdesentralisasi daripada DIY. DKI Jakarta merupakan provinsi yang persebarannya paling luas yaitu 67,95%, dan kemudian disusul oleh provinsi lainnya di antara lain yaitu provinsi Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah yaitu dengan angka sebesar (66,75%), (66,11%), (64,25%), (61,55%).

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini diharapkan agar dapat mengurangi ketimpangan bagi daerahnya masing-masing terutama di Pulau Jawa, dan juga tentunya akan memerlukan lebih banyak penelitian untuk melihat apakah hal yang dilakukan tersebut dapat memberikan dampak yang positif. Berdasarkan data yang telah ditunjukkan bahwasanya data tersebut memiliki tingkat indeks tertinggi di Provinsi DIY dan Provinsi DKI Jakarta, tingkat desentralisasi yang rendah dan PDRB perkapita di Pulau Jawa dan PDRB per kapita dibandingkan dengan pulau lainnya merupakan yang terendah.

Tingginya indeks gini di wilayah Jawa dan beberapa tingkat pendapatan yang tidak merata ini menunjukkan bahwa malah yang di hadapi sangat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di wilayah Jawa. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan ke dalam bentuk hubungan ini. Aspek-aspek ini dapat menjadi tolak ukur pengambilan keputusan jika dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengolah data menggunakan analisis data kuantitatif dan agar dapat mengetahui seberapa kuat pengaruh akan variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka dari itu peneliti menggunakan metode regresi data yaitu dengan data panel. Kemudian untuk metode analisis pada penelitian ini adalah metode analisis data panel. Metode analisis data panel ini adalah gabungan antara data dari analisis time series dan juga data analisis cross-section.

$$IG = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 UMP + \beta_3 TPT + \beta_4 DDF + \beta_5 IPM + \mu$$

Dimana:

IG	=Indes Gini
PE	=Pertumbuhan Ekonomi
UMP	=Upah Minimum Provinsi
TPT	=Tingkat Pengangguran Terbuka
DDF	=Derajat Desentralisasi Fiskal
IPM	=Indeks Pembangunan Manusia
β_0	=Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	=Koefisien regresi
μ	=Variabel pengganggu

Penelitian ini terdapat beberapa variabel terkait antara lain distribusi pendapatan atau biasa disebut indeks gini (Y), pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum provinsi (X2), tingkat pengangguran terbuka (X3), derajat desentralisasi fiskal (X4), serta indeks pembangunan manusia (X5). Sumber data diakses melalui website resmi BPS tahun 2014 hingga 2019 untuk enam provinsi di Pulau Jawa.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian

Survey yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diakses melalui internet yaitu di BPS, Bappenas, serta Bappeda, dan dijelaskan dengan mengadopsi literatur-literatur buku dan artikel jurnal ilmiah. Tujuan dalam penelitian ini ialah agar melihat seberapa besar pengaruh akan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal, serta indeks pembangunan manusia. Survei ini tentang mencari tahu apa yang harus dilakukan. Artinya, distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan enam provinsi di bagian Jawa dan data tahun 2014-2019.

Model Estimasi Common Effect

Tabel 1. Hasil Model Common Effect

Y	Coef	Std.Err.	t
X1	.0197652	.0109715	1.80
X2	-.0502438	.0136327	-3.69
X3	.0056812	.0018185	3.12
X4	-.0161894	.0217093	-0.75
X5	.0051003	.0010229	4.99
_cons	.6066789	.126547	4.79

Sumber: Data Diolah 2021

Model Estimasi Fixed Effect

Tabel 2. Hasil Model Fixed Effect

Y	Coef	Std.Err	t
X1	.0139336	.007758	1.80
X2	-.0245453	.0186401	-1.32
X3	.0028624	.0043081	0.66
X4	-.0315544	.0179451	-1.76
X5	.0037338	.0039381	-0.95
_cons	.9459631	.184844	5.12

Sumber: Data Diolah 2021

Pemilihan Model Regresi (Uji Chow)

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Prob>F = 0.0031

Sumber: Data diolah 2021

Nilai probabilitas cross-effect menggunakan perhitungan Starter 14 adalah 0,0031, yang kurang dari 5%, hasil penting untuk penerimaan Ho yang sukses dan penolakan H₁. Oleh karena itu, hasil regresi menunjukkan bahwasanya model yang tepat yang akan digunakan untuk pengujian uji chow ini antara lain adalah dengan menggunakan estimasi model fixed effect.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Prob>chi2 = 0.0205

Sumber: data diolah 2021

Nilai prob. Chi² menggunakan perhitungan starta 14 adalah 0,0205 yang kurang dari 5%, sehingga menerima Ho dan tidak menerima H₁. Oleh karena itu, pengujian uji hausman ini merupakan model terbaik yang dapat memperkirakan efek dari *random effect model*.

Model Estimasi Random Effect

Tabel 5. Hasil Regresi Random Effect

Y	Coef	Std. Err.	Z
X1	.0197652	.0109715	1.80
X2	-.0502438	.0136327	-3.69
X3	.0056812	.0018185	3.12
X4	-.0161894	.0217093	-0.75
X5	.0051003	.0010229	4.99
_cons	.6066789	.126547	4.79
DKIJKT	-5.067391		
JABAR	-1.627591		
JATENG	.9758904		
DIY	1.399177		
JATIM	11.93567		
BANTEN	2.0331		

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel model regresi random effect diatas, yang memperoleh hasil constanta Provinsi Pulau Jawa sebagai berikut:

1. DKI Jakarta, memperoleh konstanta sebesar -5.067391. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terkecil apabila dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya.
2. Jawa Barat, memperoleh konstanta sebesar -1.627591. Jawa Barat merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.
3. Jawa Tengah, memperoleh konstanta sebesar .9758904. Jawa Tengah merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terkecil ketiga setelah provinso DKI Jakarta dan Jawa Barat.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta, memperoleh konstanta sebesar 1.399177. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Banten.
5. Jawa Timur, memperoleh konstata sebesar 11.93567. Jawa Timur merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terbesar apabila dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya.
6. Banten, memperoleh konstanta sebesar 2.0331. Banten merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur.

**Pengujian Hipotesis
 Uji Determinan R²**

Tabel 6. Uji Determinan R²

R square = 0.5378

Sumber: Data diolah 2021

Hasil dari uji determinan R² dapat menunjukkan bahwasanya variabel independennya sendiri berpengaruh sangat besar akan variabel dependennya. Yang mana variabel yang berpengaruh antara lain adalah variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal, serta indeks pembangunan manusia secara berbarengan mempengaruhi variabel mempengaruhi variabel terkaitnya.

ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai nilai sebesar 0,5378 (53,78%). Hal ini menandakan bahwasanya nilai 0,4622% mampu menjelaskan variabel bebas dan sisanya yang akan dijelaskan oleh variabel lain diluar model dalam penelitian.

Uji F

F table:

= (α, k-1, n-k)

= (0,05, 5-1, 36-5)

= (0,05, 4, 31)

= 0,40

Tabel 7. Hasil (Uji F)

Number of obs = 36	R square = 0.5378
F (5, 30) = 6.98	Adj R-squared = 4608
Prob > F = 0,0002	Root MSE = .01828

Sumber: Data diolah 2021

Hasil dari pengujian dari hasil uji f diatas menandakan bahwasanya hasil ini menunjukkan nilai f hitung sebsesar 6,98 dan nilai f tabel sebesar 0,40. Emnurut hipotsis yang telah saya jelaskan sebelumnya hal ini berari menolak H₀ dan menerima H₁. Yang mana artinya adalah variabel bebasnya memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap variabel terkait. Maka dari itu dapat kita katakana bahwa variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terkait secara bersamaan.

Uji Aprioari

Tabel 8. Hasil Uji Aprioari

Variabel	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi	+	+	Sesuai
Upah Minimum Provinsi	-	-	Sesuai
Tingkat Pengangguran Terbuka	+	+	Sesuai
DerajatDesent ralisasiFiskal	-	-	Sesuai
Indeks Pembangunan Terbuka	-	+	TidakSesuai

Sumber: Data diolah 2021

Hasil dari uji aprioari diatas mengatakan bahwa hanya 4 dari 5 variabel yang diteliti yang memenuhi hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, variabel upah minimu provinsi yang memiliki pengaruh negative. Variabel tingkat pengangguran terbuka yang memiliki pengaruh positif yang berarti sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Menurut hipotesis yang diajukan, fluktuasi tingkat desentralisasi memiliki efek negatif. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki efek positif yang tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Uji Individu Uji t

T tabel :

= (α ; df)

= 0,05 ; 36-5)

= (0,05 ; 31)

= 0,16

Tabel 9. Hasil (Uji T)

Variabel	t Hitung	t Tabel	Keterangan
X1PE	1.80	0,16	Tidak Signifikan
X2UMP	-3.69	0,16	Signifikan
X3TPT	3.12	0,16	Signifikan
X4DDF	-0.75	0,16	Tidak Signifikan
X5IPM	4.99	0,16	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah 2021

Uji-t dilakukan agar dapat mengetahui rebilitas dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, diversifikasi fiskal, dan variabel indeks pembangunan manusia terkait, bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan dari Jawa. Dimana pengaruh dari variabelnya

yaitu variabel bebas terhadap variabel terkait antara lain:

Dari hasil yang telah tertera mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melakukan tingkat kesalahan senilai 0,082. Hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan yaitu 5%. Hasil riset saya ini mengatakan bahwa adanya hasil penelitian ini menolak hipotesis yang ada dalam penelitian, yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif yang tidak ada pengaruhnya terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan bahwasanya variabel upah minimum provinsi menghasilkan probabilitas senilai 0,001. Nilai ini menandakan bahwa taraf signifikan sebesar 5% menunjukkan penelitian ini menerima hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Yang mana variabel upah minimum provinsi berhubungan negative dan tidak ada pengaruhnya terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel upah minimum provinsi sendiri mempunyai nilai koefisien sebesar 0,0502438 dengan nilai statistik sebesar 3,69. Jika nilai upah minimum provinsi turun Rp.1, ketimpangan pendapatan total berkurang 0,0502438%.

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa. Berdasarkan dari hasil uji t dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan probabilitas kesalahan sebesar 0,004. Hasil ini berada di bawah taraf signifikan yaitu 5%. Hasil ini menunjukkan penerimaan hipotesis yang dikemukakan oleh hasil penelitian ini. Dengan kata lain variabel pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan dalam hubungan yang positif. Koefisien regresi untuk tingkat pengangguran terbuka adalah 0,0056812 dengan nilai statistik 3,12. Nilai tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%

meningkatkan ketimpangan total dalam distribusi pendapatan menjadi 0,0056812%.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan bahwasanya tingkat desentralisasi fiskal menghasilkan tingkat kesalahan dengan probabilitas 0,462. Nilai ini lebih besar dari nilai taraf signifikan yaitu 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya menerima hipotesis yang diajukan. Dengan kata lain, fluktuasi tingkat diversifikasi fiskal berkorelasi negatif dengan variabel dari ketimpangan distribusi pendapatan. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwasannya variabel pertumbuhan ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap variabel ketimpangan pendapatan, dan hasil yang telah diperoleh yaitu menolak hipotesis. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada penelitian ini bahwasanya variabel upah minimum provinsi mempunyai hubungan yang negative terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan, dan hasil ini tidak dengan hipotesis. Variabel upah minimum provinsi memiliki nilai koefisien sebesar 0,050248. Yang mana ketika upah minimum provinsi naik sebesar Rp.1 maka penurunan ketimpangannya sebesar 0,0502438%. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam penelitian ini variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil riset ini menerima hipotesis

yang diajukan. Variabel pengangguran terbuka memiliki nilai koefisien sebesar 0,0056812. Artinya peningkatan pengangguran terbuka senilai 1% mampu meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,0056812%. Maka riset ini mengatakan bahwasanya upsh minimum provinsi sebegitu berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi derajat persebaran keuangan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan, hasil dari penelitian ini menerima hipotesis dari penelitian ini. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal tidak sebegitu ada pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan nilai dari table uji t variabel indeks pembangunan manusia tidak penting untuk variabel ketimpangan pendapatan, hasil penelitian saya menerima hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini mengatakan indeks pembangunan manusia tidak penting bagi ketimpangan pendapatan di Jawa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas adalah:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan dapat diabaikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.
2. Variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan dalam hubungan kekayaan. Hasilnya konsisten dengan hipotesis yang diajukan. Variabel upah minimum negara memiliki nilai koefisien sebesar 0,0502438. Ini adalah upah

minimum negara sebesar Rp 1 Artinya terjadi peningkatan 1 dan penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0502438%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum negara berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa.

3. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan dalam hubungan yang positif. Hasil penelitian ini menerima hipotesis yang diajukan. Nilai koefisien untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 0,0056812. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1% pengangguran yang dinyatakan, ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 0,0056812%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum nasional berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa.
4. Tingkat variabel desentralisasi fiskal tidak memperhatikan variabel ketimpangan pendapatan, dan hasil penelitian ini mengakomodasi hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal variabel ketimpangan pendapatan tidak penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa.
5. Variabel indeks pembangunan manusia tidak penting untuk variabel ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak penting bagi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

SARAN

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka atau sering disingkat dengan (disingkat dengan (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia atau sering disingkat dengan (IPM) maka berkorelasi secara signifikan terhadap ketimpangan di Pulau Jawa dari tahun 2014 hingga 2019. Oleh karena itu, peran Jawa sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas. Dari sumber daya

manusia. Adanya kebijakan yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendapatan tinggi dan rendah untuk mengatasi kualitas sumber daya dan ketimpangan pendapatan. Pekerjaan juga harus diciptakan untuk mencegah terulangnya pengangguran.

2. Pemerintah harus berperan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan dengan pandangan yang lebih komprehensif tentang dampak keseluruhan terhadap masyarakat. Pastikan tidak ada jarak antar kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(1), 42-53, <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3747>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPEE.
- Badan Pusat Statistik (2014). *Indeks Pembangunan Masyarakat 2013*. Jakarta-Indonesia: Publikasi Badan Pusat Statistik.
- Damanik, M.A., Zulgani dan Rosmeli. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15-25.
- Faridah, N. dan Syechalad, M.N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan Padi Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 169-176.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniasih, E. P. (2013). *Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet*. *Jurnal Eksos*. 9(1), 36-48.
- Reza, M., Jamal, A., dan Zulham, T. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Distribusi Pendapatan Wilayah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 17-32. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v6i1.14256>
- Rosa, Y.D. dan Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi*, 2(4), 41-52. <https://doi.org/10.31869/me.v2i4.238>
- Soediyono. (1992). *Teori Ekonomi Mikro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional Yogya*. Yogyakarta: Liberti.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Pengantar Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. (2006). *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tulus T.H Tambunan, 2011. *Perekonomian Indonesia: Kaian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yurianto, Y. (2020). Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(1), 12-33.